

INTEGRASI EDUKASI DAN AKSI SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SELAT LANCANG, KOTA TANJUNGBALAI

Boyke Azwar, M. Safii, Agung Satria, Icha Nandita, Mirah, Elvira Azdar, Siti Fadilla, M. Habib
boykeazwar@staialhikmah.ac.id, syafiimarpaung27@gmail.com,
agungsatirawibowo111@gmail.com, icavivo851@gmail.com, miravantivivo23@gmail.com,
elviraazdar83@gmail.com, fadillfadila500@gmail.com, muhammadalhabib29068@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Hikmah Kota Tanjungbalai

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Edukasi masyarakat, aksiPemberdayaan masyarakat merupakan proses strategis untuk sosial, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengenali partisipasi, modal sosial, Kelurahanpotensi, memahami persoalan, mengembangkan keterampilan, serta Selat Lancang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sosialnya.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pemberdayaan yang berkelanjutan tidak cukup dilaksanakan melalui penyampaian informasi atau bantuan material, tetapi memerlukan integrasi antara edukasi dan aksi sosial. Edukasi berfungsi membangun pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat, sedangkan aksi sosial menjadi ruang penerapan pengetahuan melalui kegiatan kolektif yang menjawab kebutuhan nyata. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep integrasi edukasi dan aksi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat serta merumuskan strategi penerapannya di Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber kajian mencakup literatur tentang pemberdayaan masyarakat, pendidikan masyarakat, partisipasi warga, modal sosial, pengorganisasian komunitas, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi edukasi dan aksi sosial dapat dikembangkan melalui identifikasi kebutuhan partisipatif, pendidikan berbasis masalah, pelaksanaan kegiatan kolektif, pendampingan, penguatan kelembagaan lokal, serta evaluasi yang melibatkan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dipertimbangkan meliputi edukasi kesehatan dan lingkungan, pengembangan keterampilan ekonomi, literasi digital, penguatan kepedulian sosial, serta kegiatan gotong royong. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kualitas partisipasi, keberlanjutan pendampingan, kesesuaian program dengan kebutuhan warga, dan kemampuan masyarakat mengelola kegiatan secara mandiri.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan, bukan sekadar penerima manfaat program. Dalam pendekatan ini, masyarakat didorong untuk mengenali kebutuhan, memanfaatkan potensi, mengembangkan kapasitas, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau pemberian bantuan, tetapi juga menyangkut penguatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, hubungan sosial, dan kemampuan mengelola sumber daya secara mandiri (Ife, 2013; Mardikanto & Soebiato, 2017).

Pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan membutuhkan proses pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk memahami persoalan di lingkungannya, berdiskusi mengenai alternatif penyelesaian, serta mencoba menerapkan pengetahuan melalui kegiatan yang dapat diamati hasilnya. Freire (2000) menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong kesadaran kritis dan keterlibatan manusia dalam mengubah keadaan yang dihadapi. Pandangan tersebut relevan bagi pemberdayaan masyarakat karena proses pendidikan tidak seharusnya berhenti pada pemindahan informasi, tetapi perlu membantu masyarakat memahami hubungan antara persoalan yang dialami dan tindakan yang dapat dilakukan secara kolektif.

Edukasi masyarakat mempunyai peran penting dalam membangun kapasitas tersebut. Melalui pendidikan nonformal, penyuluhan, pelatihan keterampilan, diskusi warga, dan pendampingan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidupnya. Knowles

et al. (2015) menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa akan lebih bermakna ketika dikaitkan dengan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata yang dihadapi peserta. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi dalam program pemberdayaan sebaiknya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga melibatkan diskusi, demonstrasi, praktik, pemecahan masalah, dan refleksi bersama.

Namun, edukasi yang tidak disertai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan berisiko menghasilkan perubahan yang terbatas. Pengetahuan tentang kebersihan lingkungan, misalnya, belum tentu menghasilkan lingkungan yang lebih sehat apabila tidak diikuti pengelolaan sampah, penyediaan sarana pendukung, pembagian tanggung jawab, dan kebiasaan kolektif. Demikian pula, pelatihan kewirausahaan belum tentu meningkatkan kemampuan ekonomi jika peserta tidak memperoleh pendampingan dalam pengembangan produk, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan akses terhadap jaringan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan proses pembelajaran dengan aksi sosial yang terencana.

Aksi sosial dalam konteks pemberdayaan dapat dipahami sebagai tindakan bersama yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan atau persoalan masyarakat. Bentuknya dapat berupa gotong royong, pengelolaan lingkungan, kegiatan kesehatan, pendampingan kelompok rentan, pengembangan usaha komunitas, penguatan literasi, atau pengorganisasian kegiatan sosial. Aksi tersebut tidak hanya menghasilkan manfaat praktis, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mempraktikkan pengetahuan, membangun kerja sama, dan mengembangkan rasa tanggung jawab bersama. Putnam (2000) menjelaskan bahwa jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan dapat mendukung kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Sementara itu, Ostrom (1990) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama dapat

berlangsung secara efektif ketika terdapat aturan yang dipahami, keterlibatan pengguna, mekanisme pengawasan, dan kelembagaan yang sesuai.

Integrasi edukasi dan aksi sosial menjadi penting karena kedua unsur tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Edukasi membantu masyarakat memahami mengapa perubahan diperlukan, sedangkan aksi sosial menyediakan sarana untuk melaksanakan perubahan tersebut. Ketika keduanya dirancang secara terpadu, masyarakat dapat belajar dari pengalaman, menilai keberhasilan tindakan, mengenali hambatan, dan memperbaiki kegiatan berdasarkan hasil refleksi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembelajaran melalui pengalaman yang dikembangkan Kolb (1984), yaitu pembelajaran berlangsung melalui pengalaman konkret, refleksi, pembentukan pemahaman, dan percobaan tindakan baru.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai, integrasi edukasi dan aksi sosial dapat dijadikan kerangka untuk merancang program pemberdayaan yang berangkat dari kebutuhan warga dan potensi lingkungan setempat. Sebagai wilayah kelurahan, pengembangan program perlu memperhatikan keragaman kebutuhan rumah tangga, kelompok usia, kelompok ekonomi, organisasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Meskipun demikian, bentuk persoalan yang paling menonjol di Kelurahan Selat Lancang perlu ditentukan melalui pemetaan dan verifikasi lapangan. Artikel ini tidak mengasumsikan bahwa suatu persoalan tertentu telah terjadi tanpa dukungan data empiris.

Pemberdayaan di tingkat kelurahan juga memerlukan koordinasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, kelompok pemuda, kelompok perempuan, serta pihak lain yang relevan. Chambers (1997) menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan

dan pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, perencanaan program tidak semestinya hanya ditentukan oleh pihak luar, melainkan dibangun melalui dialog yang menghargai pengalaman warga dan memperhatikan kelompok yang sering kurang terwakili.

Secara konseptual, partisipasi juga tidak dapat dinilai hanya dari jumlah orang yang menghadiri kegiatan. Arnstein (1969) membedakan bentuk partisipasi berdasarkan tingkat pengaruh warga terhadap keputusan, mulai dari keterlibatan yang bersifat simbolis hingga partisipasi yang memberikan kekuasaan lebih nyata kepada masyarakat. Kerangka ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan perlu memberi kesempatan kepada warga untuk menentukan prioritas, menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasilnya. Tanpa ruang pengambilan keputusan, masyarakat berisiko hanya menjadi pelaksana program yang dirancang oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan konseptual integrasi edukasi dan aksi sosial, menjelaskan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, serta merumuskan strategi pelaksanaan yang dapat dipertimbangkan di Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi perancangan program pemberdayaan yang lebih partisipatif, aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan keputusan, mengakses sumber daya, dan memengaruhi kondisi kehidupannya. Rappaport (1987) menjelaskan pemberdayaan sebagai konsep yang berhubungan dengan upaya memperkuat kemampuan masyarakat dan

individu untuk memperoleh kendali terhadap persoalan yang memengaruhi mereka. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan tidak semata-mata diukur dari bantuan yang diterima, melainkan dari berkembangnya kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri.

Perkins dan Zimmerman (1995) menempatkan pemberdayaan sebagai konsep yang mencakup dimensi psikologis, organisasional, dan komunitas. Dimensi psikologis berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya, dimensi organisasional berhubungan dengan kapasitas organisasi untuk mengembangkan partisipasi, sedangkan dimensi komunitas menyangkut kemampuan masyarakat memengaruhi kebijakan dan sumber daya di lingkungannya. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan membutuhkan penguatan kapasitas individu sekaligus dukungan kelembagaan dan lingkungan sosial.

Dalam praktik pembangunan, pemberdayaan juga menuntut perubahan hubungan antara penyelenggara program dan masyarakat. Mardikanto dan Soebiato (2017) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya. Oleh karena itu, program pemberdayaan sebaiknya tidak berhenti pada penyaluran bantuan atau pelaksanaan kegiatan sesaat. Program perlu memiliki mekanisme pembelajaran, pendampingan, pengorganisasian, dan evaluasi yang memungkinkan masyarakat mengelola kegiatan secara bertahap.

Ife (2013) menempatkan pengembangan komunitas dalam kerangka keadilan sosial, partisipasi, penguatan kapasitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perlu memperhatikan distribusi kesempatan, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di tingkat

kelurahan perlu menghindari pendekatan seragam yang menganggap seluruh warga memiliki kebutuhan dan kemampuan yang sama.

Edukasi Masyarakat sebagai Proses Peningkatan Kapasitas

Edukasi masyarakat adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan kemampuan warga dalam menghadapi persoalan kehidupan. Edukasi dapat berlangsung melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pelatihan, penyuluhan, diskusi kelompok, praktik lapangan, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam pemberdayaan, edukasi sebaiknya dipahami sebagai proses yang menghubungkan pengetahuan dengan kemampuan bertindak.

Freire (2000) mengkritik pendidikan yang hanya menempatkan peserta sebagai penerima informasi secara pasif. Ia menawarkan pendidikan dialogis yang mendorong peserta memahami realitas sosial dan mengembangkan kesadaran kritis. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kegiatan masyarakat melalui diskusi mengenai persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan hubungan sosial. Warga tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga mengemukakan pengalaman, menguji gagasan, dan terlibat dalam merumuskan penyelesaian.

Knowles et al. (2015) menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa berkaitan erat dengan pengalaman dan kebutuhan praktis peserta. Oleh karena itu, edukasi masyarakat perlu menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, misalnya, dapat disertai latihan menyusun anggaran sederhana. Edukasi lingkungan dapat diikuti praktik pemilahan sampah. Pelatihan pemasaran dapat dihubungkan dengan penyusunan katalog produk atau penggunaan media digital untuk promosi.

UNESCO (2016) menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari

pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, prinsip tersebut berarti kegiatan edukasi perlu membantu warga memahami keterkaitan antara tindakan sehari-hari, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan lingkungan. Pendidikan yang demikian tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga mendukung terbentuknya kebiasaan kolektif.

Aksi Sosial dan Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Aksi sosial merupakan bentuk tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau memperbaiki keadaan sosial. Dalam pemberdayaan masyarakat, aksi sosial dapat berupa kegiatan kolektif yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan warga, misalnya kerja bakti, kampanye kesehatan, pengembangan kegiatan ekonomi, pendampingan keluarga, atau kegiatan pendidikan masyarakat. Aksi sosial mempunyai nilai pemberdayaan ketika warga terlibat dalam penentuan tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Kolb (1984) menjelaskan bahwa pengalaman merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Individu tidak hanya belajar melalui penerimaan informasi, tetapi juga melalui pengalaman konkret, refleksi atas pengalaman, penyusunan pemahaman, dan percobaan tindakan baru. Dengan mengadaptasi gagasan tersebut, kegiatan pemberdayaan dapat dirancang sebagai siklus: masyarakat memperoleh edukasi, menerapkannya melalui aksi, mendiskusikan hasil, kemudian memperbaiki tindakan berikutnya.

Dewey (1938) juga menekankan hubungan antara pengalaman dan pendidikan. Pengalaman dapat menjadi sumber pembelajaran ketika dirancang secara bermakna dan membantu peserta mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Dalam konteks kegiatan sosial, pengalaman gotong royong, pengelolaan

kelompok usaha, atau penyelenggaraan kegiatan kesehatan dapat digunakan sebagai bahan refleksi tentang kerja sama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik.

Aksi sosial tidak seharusnya dimaknai sebagai kegiatan yang hanya berorientasi pada hasil jangka pendek. Kegiatan yang menghasilkan lingkungan lebih bersih, misalnya, akan lebih berkelanjutan jika disertai edukasi tentang pengelolaan sampah, pembagian tanggung jawab, kesepakatan pemeliharaan, dan evaluasi rutin. Dengan demikian, aksi sosial menjadi sarana penerapan pengetahuan sekaligus wahana pengembangan kebiasaan dan kapasitas organisasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Partisipasi merupakan unsur utama dalam program pemberdayaan karena menentukan sejauh mana masyarakat mempunyai peran dalam proses perubahan. Cohen dan Uphoff (1980) membahas partisipasi masyarakat melalui beberapa tahapan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi. Kerangka tersebut berguna untuk menilai apakah masyarakat hanya hadir pada saat kegiatan berlangsung atau benar-benar terlibat dalam keseluruhan proses program.

Arnstein (1969) menunjukkan bahwa partisipasi memiliki tingkatan yang berbeda berdasarkan distribusi kekuasaan dan pengaruh warga. Kehadiran dalam pertemuan tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan. Karena itu, perencanaan pemberdayaan perlu membuka ruang bagi warga untuk menentukan persoalan prioritas, menyampaikan keberatan, mengusulkan alternatif, dan menilai penggunaan sumber daya.

Chambers (1997) mengembangkan pendekatan pembangunan partisipatif dengan menekankan pentingnya mendengarkan masyarakat serta

menggunakan pengetahuan lokal sebagai dasar perencanaan. Pendekatan ini mengingatkan bahwa pihak luar tidak selalu memiliki pemahaman paling lengkap tentang kebutuhan komunitas. Masyarakat mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang perlu ditempatkan sebagai sumber penting dalam proses identifikasi masalah.

Partisipasi yang bermakna juga harus inklusif. Kelompok perempuan, pemuda, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga berpenghasilan rendah, dan kelompok lain yang menghadapi hambatan perlu mendapatkan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pandangan. Apabila hanya tokoh atau kelompok tertentu yang menentukan arah program, kegiatan pemberdayaan berisiko menghasilkan manfaat yang tidak merata. Oleh sebab itu, mekanisme musyawarah perlu disertai strategi untuk menjangkau kelompok yang kurang terwakili.

Modal Sosial dan Kerja Sama Komunitas

Modal sosial merujuk pada sumber daya yang terbentuk melalui hubungan sosial, jaringan, kepercayaan, norma, dan kebiasaan bekerja sama. Putnam (2000) menjelaskan bahwa jaringan sosial dan norma timbal balik dapat mendukung koordinasi serta kerja sama masyarakat. Dalam program pemberdayaan, modal sosial membantu warga membangun komunikasi, membagi tugas, mengembangkan dukungan, dan menjaga kesinambungan kegiatan.

Coleman (1988) menjelaskan modal sosial melalui fungsinya dalam memfasilitasi tindakan individu dan kelompok. Hubungan sosial yang didukung kepercayaan dan norma dapat membantu masyarakat mencapai tujuan yang sulit dicapai secara individual. Misalnya, kegiatan ekonomi kelompok memerlukan kepercayaan antarpeserta, keterbukaan pengelolaan dana, dan aturan yang disepakati bersama. Tanpa unsur tersebut, program dapat mengalami konflik atau kehilangan dukungan.

Woolcock dan Narayan (2000) mengemukakan bahwa modal sosial perlu dipahami dalam kaitannya dengan pembangunan dan hubungan antara komunitas serta kelembagaan yang lebih luas. Artinya, hubungan internal masyarakat penting, tetapi hubungan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan pelaku usaha juga diperlukan agar warga dapat mengakses sumber daya dan kesempatan yang lebih luas.

Meskipun demikian, modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif secara otomatis. Jaringan yang terlalu tertutup dapat membatasi akses pihak lain, sedangkan kepercayaan yang hanya berpusat pada kelompok tertentu dapat memunculkan ketimpangan. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu membangun kerja sama yang terbuka, transparan, dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Sinergi Edukasi dan Aksi Sosial

Integrasi edukasi dan aksi sosial merupakan pendekatan yang menyatukan proses peningkatan kapasitas dengan penerapan pengetahuan dalam tindakan kolektif. Edukasi memberikan dasar pengetahuan dan kesadaran, sedangkan aksi sosial menyediakan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Keduanya perlu dirancang sebagai proses yang berulang, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

Freire (2000) menekankan hubungan antara refleksi kritis dan tindakan dalam proses perubahan. Sementara itu, Kolb (1984) menjelaskan pentingnya pengalaman dan refleksi bagi pembelajaran. Kedua perspektif tersebut dapat dipertemukan dalam program pemberdayaan: masyarakat mempelajari persoalan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan kegiatan, menilai hasil, dan mengembangkan perbaikan berdasarkan pengalaman.

Dalam program edukasi kesehatan, misalnya, penyampaian informasi mengenai perilaku hidup bersih dapat diikuti kegiatan praktik, pemetaan kebutuhan sarana, dan kampanye warga. Dalam program ekonomi, pelatihan

kewirausahaan dapat dilanjutkan dengan praktik produksi, pencatatan keuangan, pengemasan, dan pemasaran. Dalam program lingkungan, edukasi pengelolaan sampah dapat diikuti aksi pemilahan, kerja sama pengumpulan, dan evaluasi kebiasaan rumah tangga.

Integrasi tersebut memerlukan beberapa kondisi pendukung, antara lain kesesuaian materi dengan kebutuhan warga, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendampingan yang memadai, dukungan kelembagaan, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi yang berorientasi pada perbaikan. Jika salah satu unsur diabaikan, hubungan antara edukasi dan tindakan dapat terputus. Oleh karena itu, desain program perlu mempertimbangkan keseluruhan siklus pemberdayaan.

Penelitian dan Literatur Terdahulu

Literatur mengenai pemberdayaan masyarakat memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sumber daya, tetapi juga dengan proses partisipasi, penguatan kelembagaan, dan kemampuan masyarakat mempertahankan kegiatan. Mansuri dan Rao (2013) mengulas berbagai pendekatan pembangunan yang dipimpin masyarakat dan menunjukkan pentingnya memahami konteks kelembagaan, dinamika kekuasaan, serta kapasitas pelaksana dalam menentukan hasil program. Temuan konseptual tersebut memberikan pelajaran bahwa partisipasi perlu disertai desain kelembagaan dan dukungan yang sesuai.

Perkins dan Zimmerman (1995) menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat dikaji pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Perspektif ini relevan karena program edukasi dan aksi sosial tidak cukup hanya mengubah pengetahuan individu. Program juga perlu mengembangkan kelompok pelaksana, memperkuat organisasi lokal, dan meningkatkan kemampuan masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan.

Woolcock dan Narayan (2000) menekankan hubungan antara modal sosial dan

pembangunan. Hubungan sosial dapat menjadi sumber daya penting bagi kerja sama, tetapi pengembangan masyarakat juga memerlukan hubungan yang memungkinkan komunitas menjangkau lembaga dan sumber daya di luar kelompoknya. Dengan demikian, program pemberdayaan perlu memperhatikan jaringan internal sekaligus kemitraan eksternal.

Sementara itu, kajian Arnstein (1969) dan Cohen dan Uphoff (1980) memberikan landasan untuk menilai kualitas partisipasi. Partisipasi yang efektif tidak cukup ditandai oleh kehadiran warga, tetapi perlu mencakup keterlibatan dalam keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun indikator keberhasilan program pemberdayaan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan literatur tersebut, ruang pengembangan yang penting adalah penyusunan kerangka operasional yang secara khusus menghubungkan edukasi, aksi sosial, partisipasi, dan evaluasi dalam satu siklus program. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual tersebut untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pemberdayaan di Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai. Kerangka ini masih memerlukan pengujian melalui penelitian lapangan agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

METHODOLOGY

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, pembacaan, dan sintesis sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Snyder (2019) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila prosesnya dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menyintesis pengetahuan yang telah tersedia. Adlini et al. (2022) juga menjelaskan bahwa penelitian studi pustaka menggunakan sumber tertulis

sebagai bahan utama untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu permasalahan.

Fokus kajian ini adalah hubungan antara edukasi masyarakat dan aksi sosial dalam program pemberdayaan. Literatur yang menjadi dasar pembahasan mencakup buku akademik, artikel ilmiah, dan karya konseptual mengenai pemberdayaan masyarakat, pendidikan orang dewasa, partisipasi, modal sosial, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur klasik digunakan untuk menjelaskan konsep dasar, sedangkan sumber yang lebih baru diperlukan dalam tahap pengembangan naskah agar pembahasan dapat dikaitkan dengan perkembangan penelitian kontemporer.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui identifikasi literatur yang berhubungan dengan kata kunci pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat, aksi sosial, partisipasi warga, modal sosial, pendidikan nonformal, dan pembangunan komunitas. Pemilihan literatur mempertimbangkan relevansi dengan tujuan kajian, kejelasan identitas bibliografis, serta kontribusinya terhadap kerangka konseptual penelitian. Artikel ini tidak mengklaim telah melakukan penelusuran sistematis dengan protokol tertentu, sehingga tidak menyajikan jumlah artikel yang ditemukan, jumlah artikel yang diseleksi, atau skor kualitas studi yang tidak benar-benar dihitung.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan konseptual. Pertama, mengidentifikasi gagasan utama dari literatur yang berhubungan dengan pemberdayaan, edukasi, aksi sosial, dan partisipasi. Kedua, membandingkan hubungan antarkonsep untuk menemukan unsur yang saling melengkapi maupun aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Ketiga, menyusun sintesis berupa kerangka integrasi edukasi dan aksi sosial yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan

program di tingkat kelurahan.

Konteks Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai, digunakan sebagai ruang penerapan konseptual, bukan sebagai lokasi penelitian lapangan yang telah menghasilkan data primer. Oleh karena itu, usulan kegiatan dalam hasil dan pembahasan merupakan alternatif program yang perlu disesuaikan melalui pemetaan kebutuhan, musyawarah warga, dan verifikasi kondisi aktual. Untuk mengembangkan artikel ini menjadi penelitian empiris, diperlukan data wawancara dengan warga dan pemangku kepentingan, observasi kegiatan masyarakat, dokumentasi program, serta informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

RESULT AND DISCUSSION

Urgensi Integrasi Edukasi dan Aksi Sosial dalam Pemberdayaan

Berdasarkan sintesis literatur, edukasi dan aksi sosial perlu dipahami sebagai dua komponen yang saling melengkapi dalam proses pemberdayaan. Edukasi memberikan landasan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan, sedangkan aksi sosial menjadi ruang untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam menghadapi kebutuhan bersama. Integrasi ini membantu mengurangi jarak antara apa yang diketahui masyarakat dan apa yang dapat mereka lakukan.

Pemberdayaan yang hanya berorientasi pada edukasi berpotensi menghasilkan pengetahuan tanpa perubahan perilaku yang memadai. Sebaliknya, aksi sosial yang tidak disertai edukasi dapat menghasilkan kegiatan sesaat tanpa pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan cara mempertahankannya. Freire (2000) menekankan pentingnya hubungan refleksi dan tindakan dalam proses perubahan. Kolb (1984) juga menunjukkan bahwa pengalaman dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna ketika diikuti refleksi dan percobaan tindakan baru.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui program yang diawali dengan pengenalan persoalan bersama. Warga bersama pemerintah kelurahan dan unsur terkait dapat memetakan kebutuhan, menentukan prioritas, memilih bentuk edukasi, dan merancang kegiatan sosial yang realistis. Dengan cara ini, program tidak dimulai dari asumsi pihak penyelenggara, tetapi dari hasil dialog dan penilaian terhadap kebutuhan aktual masyarakat.

Sebagai contoh, apabila pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa pengelolaan sampah menjadi persoalan yang disepakati sebagai prioritas, program dapat dimulai dengan edukasi mengenai jenis sampah, dampak lingkungan, dan cara pengelolaan. Tahap berikutnya dapat berupa praktik pemilahan, penentuan jadwal pengumpulan, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi rutin. Contoh ini merupakan ilustrasi rancangan program dan bukan pernyataan bahwa masalah sampah telah terbukti menjadi persoalan utama di Kelurahan Selat Lancang.

Pemetaan Kebutuhan sebagai Dasar Penyusunan Program

Tahap pertama integrasi edukasi dan aksi sosial adalah pemetaan kebutuhan masyarakat. Pemetaan diperlukan untuk memastikan bahwa program menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan warga, bukan hanya mengikuti agenda penyelenggara. Chambers (1997) menekankan pentingnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam proses pembangunan partisipatif. Sejalan dengan itu, Cohen dan Uphoff (1980) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat perlu diperhatikan sejak tahap pengambilan keputusan.

Pemetaan dapat dilakukan melalui musyawarah warga, diskusi kelompok terarah, wawancara, observasi lingkungan, serta pemanfaatan data administrasi yang relevan. Kegiatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi keluarga,

keterampilan kerja, literasi digital, atau hubungan sosial. Setiap persoalan perlu dikaji berdasarkan tingkat kebutuhan, jumlah warga yang terdampak, ketersediaan sumber daya, kemungkinan pelaksanaan, dan potensi keberlanjutannya.

Dalam pelaksanaannya, pemetaan tidak cukup hanya meminta pendapat tokoh masyarakat. Kelompok perempuan, pemuda, warga lanjut usia, keluarga berpenghasilan rendah, dan kelompok lain yang memiliki kebutuhan khusus perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan. Hal ini penting karena pengalaman dan prioritas setiap kelompok dapat berbeda. Arnstein (1969) mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat perlu memberikan pengaruh terhadap keputusan, bukan hanya menjadi bentuk partisipasi simbolis.

Hasil pemetaan sebaiknya dituangkan dalam dokumen sederhana yang memuat masalah prioritas, kelompok sasaran, penyebab yang diperkirakan, sumber daya yang tersedia, alternatif kegiatan, dan indikator keberhasilan. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan kegiatan edukasi dengan aksi sosial. Dengan demikian, program dapat direncanakan secara terarah dan memiliki tolok ukur yang dapat dievaluasi.

Edukasi sebagai Dasar Perubahan Pengetahuan dan Perilaku

Edukasi dalam pemberdayaan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta. Materi yang disampaikan sebaiknya relevan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberi ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman. Knowles et al. (2015) menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika berkaitan dengan persoalan nyata dan pengalaman peserta. Oleh sebab itu, metode edukasi dapat berupa diskusi, demonstrasi, simulasi, praktik langsung, dan pendampingan kelompok.

Jika program diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga, edukasi dapat mencakup pengelolaan keuangan rumah tangga, pencatatan pemasukan dan

pengeluaran, pengembangan produk, pengemasan, pelayanan konsumen, serta pemasaran digital. Materi tersebut sebaiknya disertai praktik agar peserta dapat menguji keterampilan yang dipelajari. Pelatihan juga dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan peluang usaha yang telah diverifikasi melalui pemetaan lokal.

Apabila prioritas program berkaitan dengan kesehatan keluarga, edukasi dapat mencakup pemahaman informasi kesehatan, kebiasaan hidup bersih, gizi keluarga, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia. Kegiatan edukasi perlu dikembangkan bersama tenaga atau lembaga yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini penting agar materi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menggantikan layanan profesional yang dibutuhkan masyarakat.

Edukasi lingkungan dapat membahas pemilahan sampah, pengurangan penggunaan bahan sekali pakai, kebersihan ruang bersama, dan pemeliharaan sarana lingkungan. Sementara itu, edukasi sosial dapat menekankan komunikasi yang saling menghargai, penyelesaian konflik secara musyawarah, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab bersama. UNESCO (2016) menegaskan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kemampuan mengambil tindakan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, keberhasilan edukasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta atau terlaksananya pertemuan. Penilaian perlu mencakup perubahan pemahaman, keterampilan praktis, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan, observasi praktik, penilaian hasil kerja, serta refleksi peserta.

Aksi Sosial sebagai Wahana Penerapan Pengetahuan

Aksi sosial merupakan tahap penerapan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan edukasi. Dalam tahap ini, masyarakat bekerja sama melaksanakan kegiatan yang telah disepakati berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. Aksi sosial harus memiliki tujuan yang jelas, pembagian tugas, jadwal pelaksanaan, sumber daya yang memadai, dan mekanisme evaluasi.

Salah satu bentuk yang dapat dipertimbangkan adalah aksi lingkungan berbasis warga. Setelah mengikuti edukasi, masyarakat dapat menyusun kegiatan pemeliharaan lingkungan, melakukan pemetaan titik yang membutuhkan perhatian, dan menyepakati jadwal kegiatan. Jika pengelolaan sampah menjadi prioritas berdasarkan hasil pemetaan, aksi dapat mencakup pemilahan sampah, pengurangan sampah rumah tangga, atau pengembangan mekanisme pengumpulan yang sesuai dengan fasilitas setempat.

Bentuk lainnya adalah aksi sosial di bidang pendidikan, misalnya kegiatan pendampingan belajar, penguatan literasi, atau berbagi keterampilan antargenerasi. Program tersebut dapat melibatkan pemuda, orang tua, relawan, dan pihak pendidikan sesuai kapasitas masing-masing. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat, ketersediaan tenaga pendamping, serta kesinambungan kegiatan.

Pada bidang ekonomi, aksi sosial dapat berbentuk kelompok belajar usaha, praktik produksi, pameran produk warga, atau kegiatan promosi bersama apabila sesuai dengan hasil pemetaan. Pendekatan kelompok memungkinkan peserta saling bertukar pengalaman dan berbagi sumber daya. Coleman (1988) menjelaskan bahwa hubungan sosial dapat memfasilitasi tindakan kolektif, sedangkan Putnam (2000) menekankan peran jaringan dan norma timbal balik dalam mendukung kerja sama.

Namun, aksi sosial tidak boleh hanya bergantung pada semangat awal. Kegiatan perlu memiliki pengelola, jadwal yang realistis, sumber pendanaan yang transparan, dan aturan yang disepakati bersama. Apabila kegiatan memerlukan

fasilitas atau dukungan teknis dari pemerintah dan lembaga lain, kebutuhan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar kerja sama dapat berlangsung secara akuntabel.

Penguatan Modal Sosial dan Budaya Gotong Royong

Integrasi edukasi dan aksi sosial dapat menjadi ruang untuk memperkuat modal sosial masyarakat. Ketika warga terlibat dalam kegiatan bersama, mereka memperoleh kesempatan membangun kepercayaan, mengenali kemampuan satu sama lain, mengembangkan kebiasaan bekerja sama, dan membentuk jaringan dukungan. Putnam (2000) menjelaskan bahwa jaringan sosial dan norma timbal balik dapat mempermudah koordinasi dan tindakan kolektif.

Budaya gotong royong dapat menjadi salah satu sumber daya sosial dalam pemberdayaan, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu warga. Partisipasi tidak seharusnya hanya dinilai dari kehadiran fisik. Warga yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung mungkin tetap berkontribusi melalui penyediaan informasi, dukungan logistik, keahlian, atau bentuk bantuan lain yang sesuai.

Penguatan modal sosial juga membutuhkan keterbukaan. Jika pengelolaan kegiatan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, warga lain dapat merasa tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi. Karena itu, penentuan pengurus, pembagian tugas, penggunaan dana, dan evaluasi kegiatan perlu dilakukan secara transparan. Woolcock dan Narayan (2000) mengingatkan pentingnya memahami modal sosial dalam kaitannya dengan struktur kelembagaan dan hubungan komunitas dengan lingkungan yang lebih luas.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, penguatan gotong royong dapat dirancang melalui kegiatan yang dipilih bersama, pembagian peran yang adil, dan komunikasi terbuka. Bentuk kegiatannya perlu ditentukan berdasarkan hasil pemetaan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi bahwa suatu bentuk kegiatan pasti sesuai bagi seluruh warga. Dengan demikian, modal sosial dapat

digunakan untuk mendukung pemberdayaan tanpa mengabaikan perbedaan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Peran Pemerintah Kelurahan dan Organisasi Masyarakat

Pemerintah kelurahan memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebutuhan warga dengan sumber daya dan program yang tersedia. Peran tersebut dapat mencakup fasilitasi musyawarah, penyediaan informasi, koordinasi lintas lembaga, dukungan administrasi, serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, peran fasilitasi perlu dibedakan dari pengambilalihan seluruh keputusan agar masyarakat tetap menjadi pelaku utama kegiatan.

Organisasi masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, kader, lembaga pendidikan, dan kelompok usaha dapat menjadi mitra dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan sesuai kapasitas masing-masing. Kolaborasi memungkinkan program menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas dan menggabungkan beragam keahlian. Meski demikian, pembagian peran perlu dirumuskan sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa pembangunan yang dipimpin masyarakat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, dinamika kekuasaan, dan kualitas pelaksanaan. Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pihak perlu disertai aturan kerja yang jelas. Koordinasi bukan hanya soal banyaknya lembaga yang terlibat, tetapi juga kemampuan menyepakati tujuan, berbagi informasi, dan menyelesaikan perbedaan secara terbuka.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan edukasi, pendampingan, atau evaluasi program. Sementara itu, kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi teknis dapat membantu memastikan bahwa materi dan praktik sesuai standar yang relevan. Seluruh bentuk kerja sama tersebut perlu berangkat dari kebutuhan yang teridentifikasi dan memperhatikan prinsip perlindungan, kesetaraan, serta transparansi.

Rancangan Model Integrasi Edukasi dan Aksi Sosial

Berdasarkan sintesis literatur, integrasi edukasi dan aksi sosial dapat dirumuskan dalam enam tahap yang saling berhubungan.

Tahap pertama: identifikasi kebutuhan dan potensi. Masyarakat bersama pemerintah kelurahan dan pihak terkait melakukan pemetaan masalah, kelompok sasaran, potensi lokal, sumber daya, serta kegiatan yang sudah berjalan. Hasil tahap ini berupa daftar prioritas yang disepakati melalui proses partisipatif.

Tahap kedua: perencanaan partisipatif. Warga menentukan tujuan, bentuk edukasi, jenis aksi sosial, pembagian tugas, kebutuhan sumber daya, jadwal, dan indikator keberhasilan. Perencanaan perlu memberi ruang bagi kelompok yang kurang terwakili untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangannya.

Tahap ketiga: pelaksanaan edukasi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode yang sesuai dengan peserta dan persoalan yang dipilih. Materi edukasi diarahkan pada pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam aksi sosial.

Tahap keempat: pelaksanaan aksi sosial. Masyarakat mempraktikkan pengetahuan melalui kegiatan bersama. Pelaksanaan dilengkapi pembagian tanggung jawab, pendampingan, pencatatan kegiatan, serta mekanisme penyelesaian hambatan.

Tahap kelima: refleksi dan evaluasi. Warga membahas proses, hasil, kendala, dan pelajaran yang diperoleh. Evaluasi mencakup bukan hanya keluaran kegiatan, tetapi juga perubahan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kemampuan mengelola kegiatan.

Tahap keenam: penguatan keberlanjutan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program. Pengelolaan kegiatan secara bertahap dialihkan kepada kelompok masyarakat yang telah disiapkan, disertai pengembangan jejaring, dokumentasi pembelajaran, dan perencanaan kegiatan lanjutan.

Model tersebut memadukan partisipasi warga sebagaimana dibahas Arnstein (1969), dimensi partisipasi dalam siklus program sebagaimana dijelaskan Cohen dan Uphoff (1980), serta pembelajaran melalui pengalaman yang dikembangkan Kolb (1984). Model ini merupakan kerangka konseptual yang perlu diuji dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kelurahan Selat Lancang melalui penelitian lapangan.

Indikator Keberhasilan Program

Evaluasi pemberdayaan perlu menggunakan indikator yang tidak hanya mengukur jumlah kegiatan. Jumlah peserta, jumlah pertemuan, atau banyaknya bantuan yang disalurkan merupakan informasi keluaran, tetapi belum cukup menjelaskan apakah kemampuan masyarakat meningkat. Perkins dan Zimmerman (1995) menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat dikaji pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Karena itu, indikator program sebaiknya mencakup beberapa dimensi.

Dimensi pertama adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Indikatornya dapat berupa kemampuan menjelaskan materi, menyelesaikan tugas praktik, menerapkan keterampilan, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Pengukuran dapat dilakukan melalui tes sederhana, observasi, dan penilaian hasil praktik.

Dimensi kedua adalah kualitas partisipasi. Indikatornya dapat mencakup keterlibatan warga dalam menentukan prioritas, menyusun rencana, membagi tugas, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil. Kerangka Cohen dan Uphoff (1980) dapat membantu mengorganisasikan indikator partisipasi pada tahapan program.

Dimensi ketiga adalah aksi kolektif dan kerja sama. Indikatornya dapat meliputi keberlangsungan kegiatan, kejelasan pembagian tugas, keterbukaan pengelolaan, penyelesaian masalah, dan keterlibatan kelompok yang beragam. Dimensi ini berhubungan dengan konsep modal sosial yang dibahas Coleman

(1988) dan Putnam (2000).

Dimensi keempat adalah keberlanjutan program. Indikatornya dapat berupa keberadaan pengelola, jadwal kegiatan lanjutan, ketersediaan sumber daya, dokumentasi kegiatan, serta kemampuan masyarakat melakukan perbaikan tanpa bergantung sepenuhnya pada fasilitator. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan skala dan tujuan program.

Dimensi kelima adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Penilaian dapat dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok, survei sederhana, atau dokumentasi perubahan yang relevan dengan tujuan kegiatan. Manfaat tidak boleh dinyatakan telah tercapai sebelum didukung data yang memadai. Apabila program diarahkan pada perubahan perilaku atau kondisi lingkungan, pengukuran perlu dilakukan pada waktu yang sesuai agar perubahan dapat diamati secara lebih bertanggung jawab.

Hambatan dan Strategi Mengatasinya

Pelaksanaan integrasi edukasi dan aksi sosial berpotensi menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, partisipasi dapat terbatas karena perbedaan waktu, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau akses terhadap informasi. Strateginya adalah memilih jadwal yang disepakati bersama, menggunakan saluran komunikasi yang mudah dijangkau, serta menyediakan beragam bentuk kontribusi.

Kedua, program dapat terlalu bergantung pada fasilitator. Ketergantungan tersebut berisiko membuat kegiatan berhenti ketika dukungan eksternal berakhir. Untuk mengatasinya, program perlu menyiapkan kader atau pengelola lokal, mendokumentasikan prosedur, mengembangkan mekanisme regenerasi, dan mengalihkan tanggung jawab secara bertahap. Prinsip ini sejalan dengan orientasi pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Ife, 2013; Mardikanto & Soebiato, 2017).

Ketiga, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik dalam penentuan

prioritas maupun penggunaan sumber daya. Mekanisme musyawarah, transparansi, pencatatan keputusan, dan saluran pengaduan dapat membantu mengelola perbedaan. Partisipasi yang bermakna membutuhkan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pandangan serta memengaruhi keputusan, bukan sekadar menerima hasil yang telah ditentukan (Arnstein, 1969).

Keempat, kegiatan edukasi dapat tidak sesuai dengan kebutuhan peserta apabila materi disusun tanpa pemetaan. Karena itu, penyelenggara perlu mengidentifikasi kemampuan awal, pengalaman, dan kebutuhan warga sebelum memilih materi. Metode pembelajaran juga perlu memberikan ruang bagi praktik dan refleksi agar pengetahuan dapat diterapkan (Knowles et al., 2015; Kolb, 1984).

Kelima, keberlanjutan kegiatan dapat terkendala oleh keterbatasan dana, fasilitas, atau jaringan kerja sama. Strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi penggunaan sumber daya lokal secara efisien, pengembangan kemitraan, pencatatan kebutuhan biaya, dan penetapan prioritas berdasarkan manfaat serta kemampuan pelaksanaan. Penggunaan sumber daya harus transparan dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu.

Hambatan-hambatan tersebut merupakan kemungkinan yang perlu diperiksa melalui penelitian lapangan, bukan temuan faktual mengenai Kelurahan Selat Lancang. Identifikasi hambatan yang sesungguhnya harus didasarkan pada pengalaman warga, dokumentasi program, dan hasil observasi.

Implikasi bagi Program Pemberdayaan di Kelurahan Selat Lancang

Secara konseptual, integrasi edukasi dan aksi sosial menawarkan peluang untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih aplikatif di Kelurahan Selat Lancang. Namun, penerapan program perlu dimulai dengan pemetaan

kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa informasi mengenai kondisi aktual masyarakat, program berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan atau mengulang kegiatan yang telah berjalan.

Langkah awal yang dapat dipertimbangkan adalah menyelenggarakan musyawarah atau forum pemetaan yang melibatkan berbagai kelompok warga. Forum tersebut dapat digunakan untuk menentukan persoalan prioritas dan mengidentifikasi potensi yang sudah tersedia. Hasilnya kemudian diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran, kegiatan aksi sosial, pembagian tanggung jawab, dan indikator keberhasilan.

Program percontohan dapat dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, dukungan warga, sumber daya yang tersedia, dan kemungkinan keberlanjutan. Jika prioritasnya berkaitan dengan lingkungan, edukasi perlu dipadukan dengan kegiatan praktik dan pengelolaan rutin. Jika prioritasnya ekonomi, pelatihan perlu dihubungkan dengan pendampingan usaha. Jika prioritasnya pendidikan, kegiatan literasi atau pendampingan belajar perlu dirancang dengan kelompok sasaran dan jadwal yang jelas. Semua pilihan tersebut harus didasarkan pada hasil pemetaan, bukan ditetapkan sebelumnya tanpa konsultasi.

Pemerintah kelurahan dapat berperan sebagai fasilitator dan penghubung dengan lembaga terkait, sedangkan kelompok masyarakat dapat mengelola kegiatan sesuai kesepakatan. Evaluasi berkala kemudian digunakan untuk menentukan apakah kegiatan perlu dilanjutkan, diperbaiki, diperluas, atau dihentikan. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan dapat berkembang sebagai proses pembelajaran kolektif yang bertumpu pada pengalaman masyarakat.

Kontribusi utama kerangka ini adalah menempatkan edukasi, aksi sosial, partisipasi, dan evaluasi sebagai satu kesatuan. Edukasi tidak berhenti pada pengetahuan, aksi sosial tidak berhenti pada kegiatan seremonial, dan evaluasi tidak hanya menghitung keluaran. Keempat unsur tersebut diarahkan untuk

memperkuat kemampuan masyarakat memahami masalah, bertindak bersama, mempelajari hasil, dan mempertahankan perubahan yang dinilai bermanfaat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Integrasi edukasi dan aksi sosial merupakan pendekatan yang relevan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat karena menghubungkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan penerapan nyata dalam kehidupan sosial. Edukasi membantu masyarakat memahami persoalan, mengembangkan kesadaran, dan memperoleh keterampilan, sedangkan aksi sosial menyediakan ruang bagi warga untuk mempraktikkan pengetahuan melalui kegiatan kolektif. Hubungan keduanya dapat menciptakan proses pembelajaran berkelanjutan apabila disertai refleksi, evaluasi, dan perbaikan program.

Pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi dan aksi sosial perlu dibangun melalui partisipasi bermakna, pemetaan kebutuhan, perencanaan bersama, pelaksanaan kegiatan, penguatan modal sosial, serta pengembangan kelembagaan lokal. Keberhasilan program tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peserta atau kegiatan, tetapi juga berdasarkan peningkatan kapasitas, kualitas keterlibatan warga, kemampuan bekerja sama, manfaat yang dirasakan, dan keberlanjutan pengelolaan.

Dalam konteks Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai, kerangka integrasi ini dapat digunakan sebagai dasar konseptual untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk program yang dapat dipertimbangkan mencakup edukasi lingkungan, kesehatan, keterampilan ekonomi, literasi, dan penguatan kepedulian sosial. Akan tetapi, penentuan program prioritas harus didasarkan pada pemetaan dan verifikasi lapangan. Karena artikel ini menggunakan kajian pustaka, kesimpulannya merupakan sintesis konseptual dan belum dapat dianggap sebagai bukti empiris mengenai

keberhasilan program di Kelurahan Selat Lancang.

Pemerintah Kelurahan Selat Lancang disarankan memfasilitasi pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif sebelum menetapkan program pemberdayaan. Proses tersebut perlu melibatkan beragam kelompok warga agar prioritas yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan yang nyata dan tidak hanya berasal dari pandangan kelompok tertentu. Hasil pemetaan sebaiknya dijadikan dasar penyusunan tujuan, kegiatan, pembagian peran, kebutuhan sumber daya, dan indikator keberhasilan.

Pelaksana program disarankan menghubungkan setiap kegiatan edukasi dengan aksi sosial yang relevan. Pelatihan perlu disertai praktik, pendampingan, dan evaluasi agar peserta memiliki kesempatan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Program juga perlu mengembangkan pengelola lokal, dokumentasi kegiatan, transparansi sumber daya, dan mekanisme keberlanjutan supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada fasilitator eksternal.

Masyarakat disarankan berpartisipasi sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Partisipasi dapat dilakukan melalui penyampaian gagasan, pelaksanaan kegiatan, dukungan keterampilan, penyediaan informasi, dan pemantauan hasil. Untuk menjaga inklusivitas, penyelenggara perlu memastikan bahwa kelompok yang menghadapi hambatan dalam berpartisipasi tetap mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan berkontribusi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Selat Lancang melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau metode campuran. Penelitian tersebut dapat mengidentifikasi program pemberdayaan yang benar-benar berjalan, bentuk edukasi yang digunakan, tingkat partisipasi warga, hambatan pelaksanaan, serta perubahan yang dirasakan masyarakat. Data empiris tersebut diperlukan untuk menguji relevansi

model integrasi edukasi dan aksi sosial serta menyusun rekomendasi yang lebih spesifik bagi pengembangan masyarakat setempat.

REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Pemerintah Kota Tanjungbalai. (2017, April 6). *Supervisi kelurahan oleh Tim 3 PKK Provinsi Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai*. <https://tanjungbalai.org/agenda/supervisi-kelurahan-oleh-tim-3-pkk-provinsi-sumatera-utara-di-kota-tanjungbalai/>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ruswinarsih, S., Budimansyah, D., Wahyu, W., & Sauri, S. (2025).

Badingsanakan as social capital in character education: A qualitative analysis on Banjar society. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(2). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.94727>

Sjam, D. A. (2025). Peran pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.43153>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Dokumentasi











